

# PROSES POLITISASI DANA PUNIA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 DI DESA PECATU

I Putu Panji Bhaskara Wardana<sup>1)</sup>, I Ketut Putra Erawan<sup>2)</sup>, Piers Andreas Noak<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: [panjibhaskara23@gmail.com](mailto:panjibhaskara23@gmail.com)<sup>1)</sup>, [ketuterawan@gmail.com](mailto:ketuterawan@gmail.com)<sup>2)</sup>, [piers\\_noak@yahoo.com](mailto:piers_noak@yahoo.com)<sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*Dana punia activities that are not classified into the money politic activities, became the basis of the highlights of this study to show how the dana punia have been politicized to hide money politics. As a step theoretical, this study uses the theory of democracy collusive Dan Slater, who raises collusion and twilight institution theory in doing analysis of the research results. The method used in this research is descriptive qualitative method, while data collecting technique through interview (interview), chat with many people (discourse) and document analysis. Field findings indicate dana punia as a means of communication instruments candidates to obtain the support and voice of the community. Furthermore, there are no rules that prohibit their dana punia activities at the election moments. In addition to the initiative of candidates, dana punia was needed by the people for ceremonial purposes, repair temples facilities. The theoretical implications to shows that the theory of collusive democratic and twilight institution affect the voters and community support for election candidates who give dana punia in head district of Badung Regency General Election in 2016 in Pecatu village.*

**Keywords:** Dana Punia, Politicization, Election

## PENDAHULUAN

Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pemilukada merupakan sebuah sarana untuk menunjukkan sebuah daerah mempraktekkan demokrasi. Pelaksanaan pemilukada bertujuan untuk membentuk perwakilan politik di daerah. Beragam masalah timbul selama pelaksanaan pemilukada dari tahun ke tahun, mulai dari kampanye dan persaingan yang tidak sehat serta adanya praktek politik uang. Perilaku pemilih yang masih kurang sadar dan peka pada proses pemilukada menjadi salah satu faktor terpilihnya pemimpin yang tidak

berkompeten. Para pemilih sebagian besar mengetahui praktek politik uang merupakan hal yang sangat dilarang dalam pelaksanaan pemilihan umum. Namun faktanya masih banyak pemilih yang terjebak dalam praktek politik uang. Kondisi pemilih yang kurang peka terhadap proses pemilu ini dimanfaatkan oleh calon dan tim sukses yang bertarung pada perhelatan pemilukada. Berbagai cara dilakukan oleh calon dan tim sukses untuk mendapat simpati dari masyarakat guna terpilihnya sang calon dalam pertarungan pemilihan umum kepala daerah, salah satunya adalah mempolitisasi suatu kegiatan

keagamaan. Politisasi merupakan sebuah kegiatan yang ditransformasi dari sebuah kegiatan yang terlihat tidak memiliki tujuan politik ke sebuah kegiatan atau aktivitas yang secara sadar condong ke tujuan politik dan mempolitisasi dana punia merupakan salah satu cara untuk mendapatkan suara dari pemilih.

Dana punia memiliki arti sebagai sebuah pemberian atau sumbangan yang harus diberikan secara tulus ikhlas. Dana punia biasanya diberikan pada saat pelaksanaan upacara adat agama Hindu atau diberikan ketika terjadi sebuah bencana yang menimpa masyarakat Bali yang umumnya beragama Hindu. Dana punia yang merupakan bagian dari adat dan budaya Hindu Bali menjadi objek yang menarik untuk dipolitisasi oleh calon-calon kepala daerah yang bertarung dalam Pemilu Kabupaten Badung tahun 2015. Praktik dana punia yang dilakukan oleh calon-calon kepala daerah merupakan sebuah usaha untuk menyembunyikan praktek politik uang. Ada persamaan dan perbedaan Pemberian melalui dana punia yang dilakukan oleh calon-calon kepala daerah dengan praktek politik uang. Persamaan dari dana punia dan politik uang adalah kegiatannya yang memberikan atau menyumbangkan sesuatu kepada seseorang atau kelompok masyarakat. Perbedaan dari kegiatan politik uang dan dana punia adalah legalitas dari kedua praktek tersebut. Politik uang sangat jelas dilarang kegiatannya selama kampanye, sementara untuk dana punia masih bisa dilakukan karena dana punia dianggap bagian dari adat

dan budaya yang wajib dilakukan umat Hindu Bali.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Penelitian ini menggunakan dua kajian pustaka yang berkaitan dengan aktifitas politisasi. Pencantuman penelitian lain yang berkaitan dengan aktifitas politisasi dimaksudkan agar penelitian yang penulis teliti tidak menjiplak penelitian atau karya oranglain. Penelitian-penelitian tersebut bisa digunakan sebagai perbandingan dan acuan dalam penulisan penelitian ini, sehingga dapat dilihat perbedaan yang penulis kerjakan dengan penelitian-penelitian tersebut. Berikut dua penelitian yang berkaitan dengan aktifitas politisasi:

Pertama penelitian yang juga skripsi dari Aisyah (2014) berjudul "Politisasi Media Televisi Indonesia: Studi Pemberitaan tvOne terhadap PILPRES 2014". Skripsi ini menganalisa sebuah aktifitas politisasi yang terjadi dalam tubuh sebuah media televisi Indonesia, yakni tvOne yang dilakukan oleh pemilik media tersebut. Praktik politisasi media sangat kental dan sangat menarik ketika masa PILPRES 2014 berlangsung. Media-media televisi swasta di Indonesia pada masa PILPRES 2014 terbagi menjadi dua buah kubu yang juga kebetulan pada pemilihan Presiden 2014 terdapat dua pasang kandidat Presiden dan Wakil Presiden. Penelitian dari Aisyah ini menggunakan teori Hirarki Pengaruh dan teori analisis wacana kritis model van Dijk. Kesamaan penelitian ini dengan penulis adalah mengangkat masalah politisasi yang terjadi untuk memenangkan seseorang. Namun penelitian tersebut lebih

memfokuskan politisasi yang memanfaatkan kepemilikan media televisi, sedangkan pada penelitian penulis mengambil fokus politisasi yang memanfaatkan dana punia yang dibalut dengan budaya untuk menyembunyikan praktek politik uang.

Kedua yakni skripsi dari Irham Pradipta Fadli (2012) berjudul "Sepakbola dan Politik: Politisasi Persatuan Sepakbola Indonesia Bandung (Persib) Oleh Dada Rosada pada Pemilukada Kota Bandung 2008". Dada Rosada yang disebutkan sebagai salah satu calon incumbent yang bertarung dalam Pemilukada Kota Bandung menjadikan Persatuan Sepakbola Indonesia Bandung sebagai modal sosialnya dalam berkampanye. Dalam hal ini, Dada Rosada juga memegang posisi Ketua Umum Persib sehingga memudahkan dirinya untuk politisasi. Politisasi Persib dikarenakan klub sepakbola kebanggaan warga Bandung ini mampu mengumpulkan masyarakat Bandung yang suka dan fanatik dengan Persib. Berbeda dengan fokus penelitian yang penulis kerjakan, dana punia merupakan sarana yang digunakan kandidat untuk mempolitisasi. Kegiatan dana punia merupakan suatu keharusan dalam ajaran Agama Hindu dan dilakukan dengan tulus ikhlas. Kegiatan dana punia yang dilakukan menjelang Pemilukada tujuannya berbeda dengan dana punia yang dilakukan pada hari biasa. Dana punia dimanfaatkan oleh kandidat untuk menyembunyikan praktek politik uang yang dilarang di Indonesia. Praktek politik uang dan dana punia merupakan satu kegiatan yang sama apabila menjelang Pemilukada. Hanya saja kata dana punia dan prakteknya dibalut

oleh adat dan budaya, dan belum ada undang-undang yang melarang melakukan dana punia ketika Pemilukada. Keadaan tersebut dimanfaatkan kandidat untuk memudahkan politisasi.

## **METODELOGI PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat empiris. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Desa Pecatu dengan alokasi waktu penelitian selama dua bulan. Sumber data penelitian ini didapat dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari sumber tertulis berupa penelitian, foto atau dokumen. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi pustaka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Pecatu terletak di kaki Pulau Bali paling ujung selatan merupakan bagian wilayah dari Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Batas administrasi dari Desa Pecatu, yaitu: sebelah utara Tukad Cengingiling/ Kelurahan Jimbaran (Patok Beton), sebelah timur Tukad Gau/ Desa Ungasan (Patok Beton), sebelah selatan Samudera Indonesia, dan sebelah barat Samudera Indonesia. Desa Pecatu terdiri dari tiga Banjar Adat dan sembilan Banjar Dinas. Jumlah penduduk Desa Pecatu pada tahun 2014 berjumlah 7.426 jiwa, terdiri dari 3.719 penduduk laki-laki, dan 3.707 penduduk perempuan. Berdasarkan data dari Kantor Desa Pecatu, jika dibandingkan dengan tahun 2013 jumlah penduduk Desa Pecatu

mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 jumlah pemeluk agama Hindu di Desa Pecatu yaitu 7.525 jiwa mengalami peningkatan dari 7.004 jiwa pada tahun 2013. Peningkatan jumlah pemeluk agama non Hindu yang lainnya juga mengalami peningkatan dari tahun 2013 menuju tahun 2014. Jumlah pemeluk agama Hindu merupakan yang terbanyak di Desa Desa Pecatu dan pemeluk agama Islam terbanyak ke-2. Hal mengenai jumlah pemeluk agama Hindu di Desa Pecatu, secara tidak langsung turut berkaitan dengan aspek lainnya, yaitu jumlah pura paibon yan ada di Desa Pecatu.

Pada Pemiluada serentak 9 Desember 2015 kemarin, terdapat dua pasang calon yang bertarung untuk merebut kursi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung. Pasangan nomor urut satu adalah I Nyoman Giri Prasta, S.Sos – Drs. I Ketut Suiasa, S.H. Nomor urut dua pasangan I Made Sudiana, S.H., M.Si. – Drs. I Nyoman Sutrisno. Giri Prasta merupakan Ketua DPC PDI-P Kabupaten Badung dan pasangannya Ketut Suiasa Ketua DPD II Kabupaten Badung saat itu. Yang menarik terdapat dua kader Golkar yang bertarung dalam Pemiluada ini. I Made Sudiana juga merupakan kader Partai Golkar, namun rekomendasi partai jatuh pada Ketut Suiasa dan Made Sudiana diusung oleh Partai Gerindra. Sedangkan pasangan dari Made Sudiana, I Nyoman Sutrisno merupakan Kader Partai Demokrat.

Masyarakat Desa Pecatu mayoritas penduduknya adalah beragama Hindu yang taat akan hukum adat di Bali. Masyarakat Bali menjalani dua hukum yang ada, yaitu hukum

adat Bali dan hukum nasional yang tertuang dalam undang-undang. Namun belakangan muncul permasalahan baru, dimana hukum adat digunakan untuk melindungi diri dari jerat hukum nasional. Hal yang dimaksud adalah pelaksanaan dana punia menjelang diadakannya hajatan politik. Hampir di setiap hajatan politik banyak calon melakukan aktifitas dana punia. Jika dilihat dari aktifitasnya, dana punia berupa sumbangsih tulus ikhlas yang diberikan kepada masyarakat. Aktifitas politik uang juga memiliki ciri aktifitas yang sama dengan dana punia berupa pemberian sumbangan. Aktifitas dana punia bisa dibedakan dengan aktifitas politik uang. Apabila ada pasangan calon melaksanakan dana punia di suatu tempat dengan ditambahkannya janji politik, sudah jelas aktifitas itu bukan dana punia melainkan politik uang. Aktifitas politik uang sudah tentu tindakan yang melanggar, namun ketika calon tersebut menggunakan bahasa dana punia belum ada peraturan dari penyelenggara Pemilihan Umum yang tersurat khusus untuk mengatur dana punia.

Hasil temuan lainnya yang dapat penulis jelaskan adalah dana punia sebagai instrumen komunikasi untuk memperoleh suara. Dana punia yang dilakukan di sekitar Desa Pecatu menurut salah satu relawan memang tujuannya untuk memperoleh suara dukungan dari masyarakat. Namun sang calon tidak secara blak-blakan untuk mengajak mememilihnya setelah berdana punia. Sang calon menggunakan bahasa istilah “titip nama” kepada para masyarakat. Dan masyarakat tentu sudah mengerti maksud dari titip nama tersebut. Selain para

calon datang dengan inisiatif sendiri untuk berdana punia, ternyata ada permintaan dari masyarakat untuk mengunjungi pura-pura paibon dengan syarat membuat undangan. Dapat dikatakan bahwa aktifitas dana punia dianggap menguntungkan karena pertama tidak ada aturan yang melarang dan kedua kebutuhan masyarakat akan dana punia yang digunakan untuk keperluan upacara atau perbaikan fasilitas pura.

## KESIMPULAN

Pada Pemilu serentak 9 Desember 2015, Kabupaten Badung salah satu daerah yang juga menyelenggarakan pergantian Bupati dan Wakil Bupati. Terdapat dua pasang calon yang bertarung di Kabupaten Badung, yaitu pasangan I Nyoman Giri Prasta, S.Sos. – Drs. I Ketut Suiasa, SH. Dan pasangan I Made Sudiana, SH, M.Si – Drs. I Nyoman Sutrisno. Fenomena Dana Punia terkait Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 melahirkan masalah yang dimanfaatkan calon. Berdasar hasil analisis penelitian, penulis dapat menarik beberapa poin penting sebagai kesimpulan penelitian, yaitu:

1. Belum ada aturan yang tersurat untuk mengatur aktifitas dana punia selama hajatan Pemilihan Umum.
2. Dengan tidak adanya aturan dari penyelenggara Pemilihan Umum mengenai dana punia, dimanfaatkan oleh pasangan calon yang bertarung untuk menyembunyikan kegiatan politik uang.
3. Dana punia tidak tergolong politik uang jika tujuan memberikan dana punia kepada masyarakat oleh pasang calon tidak

diiringi janji politik dan menginstruksikan untuk memilihnya.

4. Selain inisiatif dari calon, dana punia juga dibutuhkan oleh masyarakat dengan cara mengundang calon untuk hadir dihadapan mereka. Dana punia dibutuhkan dengan alasan dana punia untuk keperluan upacara, perbaikan fasilitas pura dan lain-lain.
5. Tidak ada pelaporan kasus dana punia, sehingga aktifitas ini bisa dijalankan oleh calon dengan leluasa dan diluar pengawasan penyelenggara Pemilihan Umum karena mengenai dana punia tidak diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
6. Dana punia berpengaruh sebagai alat untuk memperoleh dukungan dan suara masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andrianus Pito, Toni dkk. (2013). *Mengenal Teori-teori Politik: Dari Sistem Politik sampai Korupsi*. Bandung: Nuansa Cendeka.
- Aspinal, Erdward dan Mada Sukmajati. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov.
- Budiardjo, Miriam. (2010). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harrison, Lisa. (2009). *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana.

- Marijan, Kacung. (2010). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta:Kencana.
- Ngurah Made Suyadnya, I Gusti. (2006). *Dana Punia dan Penebusan Dosa*. Surabaya:Paramita.
- Pamungkas, Sigit. (2010). *Pemilu, Perilaku Pemilih & Kepartaian*. - Yogyakarta:Institute for Democracy and Welfarism.
- Sumber Jurnal, Skripsi, Tesis Desertasi**
- Aisyah. (2014). "*Politisasi Media Televisi Indonesia: Studi Pemberitaan tvOne terhadap PILPRES 2014*". FISIP, UIN Syarif Hidayatullah.
- Pradipta Fadli, Irham. (2012). "*Sepakbola dan Politik: Politisasi Persatuan Sepakbola Indonesia Bandung (Persib) Oleh Dada Rosada pada Pemilukada Kota Bandung 2008*". FISIP, Universitas Indonesia